
**PENDAPAT ULAMA ACEH TERHADAP ISU KEPEMIMPINAN
PEREMPUAN**
**(Studi Kasus Illiza Sa'aduddin Djamal Dalam Kontestasi Pilkada Kota
Banda Aceh 2017)**

Azmi Ramadhan, Faradilla Fadlia
(arralifekribo@gmail.com, faradilla_fadlia@unsyiah.ac.id)
Program Studi Ilmu Politik, FISIP, Universitas Syiah Kuala

ABSTRAK

Di Aceh, perdebatan mengenai boleh tidaknya memilih perempuan sebagai pemimpin selalu ada dari waktu ke waktu. Masyarakat Aceh memang tidak bisa lepas dari nilai-nilai Islam. Pada konteks kepemimpinan perempuan, pandangan ulama umumnya sangat menentukan arah pemikiran masyarakat Aceh dalam menyikapi hal tersebut. Pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) kota Banda Aceh tahun 2017 lalu, ulama Abu Tumin Blang Blahdeh sempat mengeluarkan pendapat bahwa pemimpin dari kalangan perempuan boleh-boleh saja. Namun pendapat tersebut memiliki perbedaan dengan pendapat Abu Mudi yang juga merupakan ulama di Aceh. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pendapat ulama Aceh dan respon aktivis perempuan terhadap isu kepemimpinan wanita pada kontestasi Pilkada Kota Banda Aceh tahun 2017. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data diperoleh melalui sumber data primer dan data skunder, data primer melalui penelitian lapangan yaitu dengan melakukan wawancara kepada informan. Sedangkan data sekunder melalui penelitian kepustakaan yaitu dengan dokumen-dokumen, buku-buku dan bacaan-bacaan terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hegemoni ulama cukup besar dan menjadi faktor utama dalam pergulatan politik pada Pilkada Kota Banda Aceh tahun 2017. Kemudian Respon aktivis perempuan di Kota Banda Aceh terhadap pendapat ulama tersebut ditanggapi beragam, namun secara umum aktivis merespon dengan kritikan yang tidak terlalu kuat dan massive.

Kata Kunci : Feminisme, Hegemoni, Pilkada Kota Banda Aceh

ABSTRACT

In Aceh, the debate over whether or not to elect women as leaders always exists from time to time. The people of Aceh can not be separated from Islamic values. The Islamic values are scattered and very closely related to the spread manifested thanks to the role of clerics. In the context of women's leadership, the cleric's views generally determine the direction of the Acehnese people's think in dealing with it. In the Locals Leaders Election (Pilkada) of Banda Aceh in 2017, Abu Tumin Blang Blahdeh had issued an opinion that the leader of the women is okay. There is also another opinion from Abu Mudi who is also a cleric in Aceh. He said the law of women running for a leader is haram. This study aims to determine the influence of the opinion of Aceh cleric's on the issue of women leadership and in Aceh to find out the response of women activists on the contestation of elections in Banda Aceh on 2017. The research method used is qualitative research method with descriptive approach. Data obtained through primary data sources and secondary data, primary data through field research is by conducting interviews to informants. While the secondary data through literature research that is with documents, books and related reading. The results show that the cleric hegemony is big enough and become the main factor in the political struggle in Banda Aceh elections in 2017. Then the response of women activists in Banda Aceh to the opinion of the scholars are responded to vary, but in general activists respond with criticism that is not too strong and massive.

Key words : *Feminism, Hegemony, Local Leaders Election*

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Kepemimpinan adalah kegiatan manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Kepemimpinan secara etimologis menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, berasal dari kata "pimpin". Dengan diawali menjadi "memimpin" maka berarti menuntun, menunjukkan jalan dan membimbing. Secara terminologis, kepemimpinan adalah aktivitas untuk mempengaruhi perilaku orang lain agar mereka mau diarahkan untuk mencapai tujuan tertentu. Dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan adalah proses mempengaruhi perilaku seseorang, sehingga apa yang menjadi ajakan dan seruan pemimpin dapat dilaksanakan orang lain guna mencapai tujuan yang menjadi kesepakatan antara pemimpin dengan rakyatnya (kammiuinsuka, 2015).

Pendapat Ulama Terhadap Isu Kepemimpinan Perempuan (Studi Kasus Illiza Sa'aduddin Djamal Dalam Kontestasi Pilkada Kota Banda Aceh 2017)

(Azmi Ramadhan, Faradilla Fadlia)

Jurnal ilmiah mahasiswa FISIP Unsyiah, Vol. 3. No. 3. Agustus 2018:

Di era modern ini, sudah menjadi hal yang umum perempuan menjadi seorang pemimpin, dalam beberapa daerah di Indonesia kepemimpinan perempuan juga sudah muncul dan dapat di lihat seperti di daerah Tangerang Selatan, Surabaya serta di beberapa daerah Indonesia lainnya. Dalam tulisan ilmiahnya Syahfitri Anita yang berjudul "Gerakan Perempuan: Kajian Teoritis", wacana gerakan perempuan yang dihadirkan sejak awalnya merupakan suatu usaha untuk mengangkat posisi perempuan. Ini berangkat dari asumsi bahwa peran perempuan dalam kehidupan masyarakat atau ranah kebijakan publik di berbagai belahan dunia dari waktu ke waktu terus berkembang, khususnya di Indonesia. Perkembangan ini tentunya mengarah kepada terciptanya ruang yang memberikan kesetaraan bagi perempuan baik secara individual maupun perempuan sebagai komponen masyarakat (Anita, 2006: 03).

Munculnya perspektif gender dan gerakan feminisme diakhir abad 19, pergerakan perempuan di ranah produktif mulai menunjukkan eksistensinya. Dapat dilihat bagaimana perempuan dilibatkan secara aktif bekerja di berbagai bidang. Mulai dari bidang ekonomi, sosial, politik hingga agama. Meski demikian, perempuan masih terbelenggu dengan budaya, mitos dan jauh dari kata kompetensi yang sehat di ranah produktif. Berbagai anggapan tentang perempuan yang bekerja di ranah produktif akan lebih kesulitan mengambil kebijakan ketimbang laki-laki, sekalipun kompetensinya melampaui laki-laki. Begitu pula dari sisi agama, perempuan pemimpin hingga saat ini masih dianggap tabu dan menyalahi kodrat (Nurhayati, 2015: 163).

Hal tersebut terjadi di Banda Aceh ketika seorang perempuan mencalonkan diri menjadi pemimpin. Illiza Sa'aduddin Djamal, perempuan yang lahir dari keluarga ulama ini memulai karirnya sebagai wakil bendahara PPP Kota Banda Aceh, dan tahun 2004-2006 Illiza juga menjabat sebagai Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Banda Aceh, pada periode 2006-2011 ia juga dipercaya menjadi ketua Dewan Pimpinan Cabang (PPP), bahkan di tahun 2007-2012 Illiza Sa'aduddin Djamal menjabat sebagai Wakil Walikota Banda Aceh, kemudian pada tahun 2014 menjabat sebagai walikota Banda Aceh menggantikan Mawardy Nurdin yang meninggal dunia (walikota.bandaacehkota, 2014).

Di Aceh, perdebatan mengenai boleh tidaknya memilih perempuan sebagai pemimpin selalu ada dari waktu ke waktu. Belum ada

Pendapat Ulama Terhadap Isu Kepemimpinan Perempuan (Studi Kasus Illiza Sa'aduddin Djamal Dalam Kontestasi Pilkada Kota Banda Aceh 2017)

(Azmi Ramadhan, Faradilla Fadlia)

Jurnal ilmiah mahasiswa FISIP Unsyiah, Vol. 3. No. 3. Agustus 2018:

kesepakatan mengenai hal ini bisa berlangsung di Aceh. Justru, isu ini terus digulirkan, bahkan menjadi “senjata politik” terutama menjelang pemilihan pemimpin di level-level tertentu.

Masyarakat Aceh memang tidak bisa lepas dari nilai-nilai Islam. Nilai-nilai Islam tersebut tersebar dan sangat berkaitan erat penyebarannya terwujud berkat peran ulama dan para penguasa sejak awal masa kerajaan hingga pemerintahan sekarang ini. Pada kultur masyarakat Aceh, ulama adalah salah satu elemen masyarakat yang memiliki status sosial yang tinggi dan mulia, bahkan pemikiran ulama memiliki pengaruh dalam pembentukan pandangan masyarakat Aceh yang Islami (suduthukum, 2016).

Pada konteks kepemimpinan perempuan, pandangan ulama umumnya sangat menentukan arah pemikiran masyarakat Aceh dalam menyikapi hal tersebut. Pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) kota Banda Aceh tahun 2017 lalu, ulama Abu Tumin Blang Blahdeh sempat mengeluarkan pendapat bahwa pemimpin dari kalangan perempuan boleh-boleh saja. Menurutnya, kepemimpinan perempuan telah ada sejak zaman keemasan Aceh, dan ulama saat itu juga tidak pernah melarang perempuan menjadi pemimpin, dan kitab suci umat islam yang mengatakan bahwa laki-laki adalah pemimpin bagi perempuan hanya dikhususkan dalam urusan rumah tangga bukan dalam urusan pemerintahan (modusaceh, 2016).

Namun pendapat ulama Abu Tumin Blang Blahdeh tersebut berbeda dengan Abu Mudi, ulama lain yang juga sangat berpengaruh di Aceh. Menurut beliau, hukum perempuan mencalonkan diri sebagai pemimpin adalah haram. Selain itu, Abu Mudi juga menjelaskan tentang bagaimana status dan hukum bagi perempuan yang mencalonkan dirinya sebagai pemimpin (portalsatu, 2016).

Terlepas dari dua pendapat ulama yang berbeda tersebut, dalam konteks akademis untuk melihat persoalan kepemimpinan perempuan, Pengamat politik dari Unsyiah Dr. Effendi Hasan, M.A mengatakan ada faktor lain yang terkait dan turut berkembang saat kampanye Pilkada 2017 tersebut, antara lain dengan menggelindingnya isu perempuan tidak boleh memimpin. Effendi Hasan juga menerangkan, masyarakat Banda Aceh masih melihat persaingan elit di Pilkada dalam konteks sosiologis. “Maksudnya, masyarakat masih melihat agama sebagai tolak ukur

Pendapat Ulama Terhadap Isu Kepemimpinan Perempuan (Studi Kasus Illiza Sa’aduddin Djamal Dalam Kontestasi Pilkada Kota Banda Aceh 2017)

(Azmi Ramadhan, Faradilla Fadlia)

Jurnal ilmiah mahasiswa FISIP Unsyiah, Vol. 3. No. 3. Agustus 2018:

pertimbangan pemilih dalam menentukan pilihannya” (pikiranmerdeka, 2017).

Landasan Teoritis

Landasan teoritis disebagian literatur karya ilmiah disebut juga sebagai tinjauan teoritis, kerangka pemikiran atau kerangka konseptual. Berdasarkan teori yang peneliti gunakan, maka mempermudah untuk memecahkan masalah yang dikaji serta terlihat kerangka pemikiran atau alur pikir. Peneliti dalam menyelesaikan penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan sebagai pisau analisa kajian penelitian ini.

Teori Hegemoni

“The practices of a capitalist class or its representatives to gain state power and maintain it later.” Konsep Gramsci tentang hegemoni adalah bahwa suatu kelas dan anggotanya menjalankan kekuasaan terhadap kelas-kelas di bawahnya dengan cara kekerasan dan persuasi. Hegemoni bukanlah hubungan dominasi dengan menggunakan kekuasaan, melainkan hubungan persetujuan dengan menggunakan kepemimpinan politik dan ideologis. Hegemoni adalah suatu organisasi konsensus. Dalam beberapa karyanya, *Prison Notebooks*, Gramsci menggunakan kata *direzione* (kepemimpinan, pengarahan) secara bergantian dengan *egemonia* (hegemoni) dan berlawanan dengan *dominazione* (dominasi) (Simon, 2004: 19-20).

Gramsci mengatakan hegemoni berawal dari dialektis dikotomi pemikiran politik tradisional Italia tentang adanya kekuatan (*force*) dan persetujuan (*consent*). Bagi Gramsci, kelompok sosial akan memperoleh keunggulan atau supremasi melalui dua cara yakni; *dominio* (dominasi) atau *coercion* (paksaan) dan cara kepemimpinan intelektual dan moral (Patria, Arif, 2003: 119).

Konsep Kepemimpinan

Alle dalam Kartono (2009: 39) menyatakan pemimpin itu adalah pemandu, penunjuk, penuntun, dan komandan. Begitu pula, Kartono (2009: 38) mengatakan bahwa pemimpin adalah seorang pribadi yang memiliki kecakapan dan kelebihan khususnya kecakapan dan kelebihan di satu bidang, sehingga dia mampu mempengaruhi orang lain untuk bersama-sama melakukan aktivitas-aktivitas tertentu, demi pencapaian satu atau beberapa tujuan.

Pendapat Ulama Terhadap Isu Kepemimpinan Perempuan (Studi Kasus Illiza Sa'aduddin Djamal Dalam Kontestasi Pilkada Kota Banda Aceh 2017)

(Azmi Ramadhan, Faradilla Fadlia)

Jurnal ilmiah mahasiswa FISIP Unsyiah, Vol. 3. No. 3. Agustus 2018:

Pada dasarnya, aktivitas yang “dipimpin” dan yang “memimpin” itu merupakan dua hal yang berbeda, namun kedua hal tersebut perlu dipelajari bersama-sama agar pemimpin dapat menjadi penuntun yang baik, sehingga para pengikut pun bias menjadi pihak terpimpin yang baik pula. Dalam kehidupan, dikenal beberapa jenis pemimpin di antaranya pemimpin formal dan pemimpin informal. Pemimpin formal menurut Kartono (2009: 9-10) ialah orang yang oleh organisasi atau lembaga tertentu ditunjuk sebagai pemimpin, berdasarkan keputusan dan pengangkatan resmi untuk memangku suatu jabatan dalam struktur organisasi dengan segala hak dan kewajiban yang berkaitan dengannya untuk mencapai sasaran organisasi.

METODE PENELITIAN

Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di Kota Banda Aceh, mengingat terjadinya kontestasi pilkada 2017 yang terkait dengan pencalonan pemimpin perempuan. Kajian penelitian ini fokus pada pengaruh pendapat ulama Aceh terhadap isu kepemimpinan wanita yang akan dihimpun melalui wawancara dengan informan, buku-buku, teori, dan tulisan ilmiah dengan tujuan untuk mendapatkan data (informasi) agar dapat menjelaskan dan menjawab permasalahan penelitian yang bersangkutan secara objektif.

Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Dalam hal ini disebutkan kualitatif karena sifat data yang dikumpulkan adalah data kualitatif, yakni tidak menggunakan alat-alat pengukur. Metode kualitatif menghasilkan data deskriptif, baik berupa kata-kata ungkapan tertulis maupun lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati (Moleong, 2002: 3).

Informan Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti mengambil beberapa orang informan. Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah:

1. Ulama Aceh (3 orang)
2. Pengamat Politik (1Orang)
3. Akademisi/Pakar (1 Orang)
4. Aktivis Perempuan (4 Orang)
5. Masyarakat Kota Banda Aceh (2 Orang).

Pendapat Ulama Terhadap Isu Kepemimpinan Perempuan (Studi Kasus Illiza Sa'aduddin Djamal Dalam Kontestasi Pilkada Kota Banda Aceh 2017)

(Azmi Ramadhan, Faradilla Fadlia)

Jurnal ilmiah mahasiswa FISIP Unsyiah, Vol. 3. No. 3. Agustus 2018:

Sumber Data

Sumber data utama penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah penelaahan dokumen, informasi dan sebagainya. Pemilihan sumber data sesuai dengan acuan teori dan rumusan masalah. Data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder.

Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data atau informasi, keterangan-keterangan data yang diperlukan peneliti menggunakan metode-metode sebagai berikut:

1. Wawancara

Wawancara merupakan kegiatan pengumpulan data dengan teknik tanya jawab antara dua orang yang dikerjakan secara sistematis dan berlandaskan tujuan penelitian (Hadi, 1993: 193). Teknik tanya jawab berlangsung melalui kontak secara langsung, baik secara lisan maupun tatap muka dengan informan. Dalam penelitian kualitatif digunakan pedoman wawancara mendalam yang berarti pertanyaan telah disiapkan sebelumnya, tetapi daftar tanyaannya tidak mengikuti jalannya wawancara. Daftar wawancara digunakan agar arah wawancara tetap terkendali dan tidak menyimpang dari pokok permasalahan penelitian.

2. Dokumentasi dan Kepustakaan

Dokumentasi digunakan untuk mendapatkan data skunder sebagai pelengkap data primer dengan cara mempelajari dan menganalisis bukubuku, jurnal, dokumen, Arsip atau informasi lainnya dari internet yang berkaitan dengan kajian penelitian ini. Sedangkan tinjauan kepustakaan (*Library Research*) dalam penelitian ini sangat diperlukan untuk menunjang penelitian yang sedang diteliti oleh penulis. Teknik analisis data

Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses yang dilakukan secara sistematis untuk mencari dan menemukan serta menyusun transkrip wawancara maupun observasi kepustakaan, dan bahan bahan lainnya yang telah dikumpulkan peneliti. Dengan cara ini, diharapkan peneliti dapat menemukan pemahaman tentang data yang tepat dan memungkinkan menyajikan data tersebut secara sistematis guna menginterpretasikan dan menarik kesimpulan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pendapat Ulama Terhadap Isu Kepemimpinan Perempuan (Studi Kasus Illiza Sa'aduddin Djamal Dalam Kontestasi Pilkada Kota Banda Aceh 2017)

(Azmi Ramadhan, Faradilla Fadlia)

Jurnal ilmiah mahasiswa FISIP Unsyiah, Vol. 3. No. 3. Agustus 2018:

Pro dan Kontra Pendapat Ulama Terkait Isu Kepemimpinan Perempuan pada Pilkada Kota Banda Aceh Tahun 2017

Sejak zaman Kesultanan, masyarakat Aceh telah memberi legitimasi secara sosialkultural dan sosialpolitik kepada Ulama yang ada di Aceh. Pemerintahan pada saat itu telah menjadikan Ulama sebagai mitra kerja pada pemerintahan. Sejarah mencatat bahwa Ulama merupakan kelompok elit sosial dan elit masyarakat yang dapat dikatakan sebagai pemimpin masyarakat terkait pandangan keagamaan. Dalam menjalankan tugasnya sebagai mitra kerja pemerintah, Ulama akan memberikan atau mengeluarkan fatwa terkait persoalan hukum dan hal-hal yang berkenaan dengan masyarakat (suduthukum, 2016).

Aceh pasca perundingan MoU Helsinki yang menghasilkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, didalamnya juga mengatur terkait penegakan Syariat Islam di Aceh. Melalui undang-undang tersebut Aceh mendapat keistimewaan berupa pelaksanaan kehidupan beragama, adat dan pendidikan serta memperhatikan peranan Ulama dalam penetapan kebijakan daerah. Tidak hanya tertulis di dalam sejarah terkait peranan Ulama di Aceh, dewasa ini Ulama juga mendapat tempat untuk berkontribusi didalam pemerintahan Aceh. Hal ini merupakan penegasan dari keistimewaan Aceh dengan mewujudkan pelaksanaan Syariat Islam didalam aspek kehidupan sosial masyarakat Aceh secara menyeluruh.

Namun pada tataran realitanya, pendapat Ulama Aceh terkait Pilkada Kota Banda Aceh Tahun 2017 yang melibatkan salah satu calon pemimpin Kota Banda Aceh dengan berjenis kelamin perempuan, menjadi perdebatan ditengah masyarakat Kota Banda Aceh. Persoalan ini disebabkan oleh adanya perbedaan pandangan terkait kepemimpinan perempuan dalam pandangan Islam yang kemudian menjadi pro dan kontra di tengah masyarakat. Jika merujuk kepada pendapat dari salah satu Ulama Aceh yaitu Tgk. H. Muhammad Amin (Abu Tumin) mengatakan tidak adanya nash (teks) yang ahir atau jelas aik didalam Al-Quran dan Al-Hadist mengharamkan kepemimpinan perempuan. Namun perbedaan pandangan itu datang dari Ulama Aceh lainnya yaitu Teungku H. Hasanoel Basry (Abu Mudi) yang mengatakan bahwa merujuk pada ayat 34 surat Q.S. al-Nisa yang mengatakan sudah dijelaskan bahwa pemimpin itu adalah laki-laki bukan perempuan baik dirumah maupun diluar rumah. Abu Mudi kemudian menambahkan bahwa hukum yang

Pendapat Ulama Terhadap Isu Kepemimpinan Perempuan (Studi Kasus Illiza Sa'aduddin Djamal Dalam Kontestasi Pilkada Kota Banda Aceh 2017)

(Azmi Ramadhan, Faradilla Fadlia)

Jurnal ilmiah mahasiswa FISIP Unsyiah, Vol. 3. No. 3. Agustus 2018:

dipelajari berasal dari kitab-kitab fiqih, kitab yang merupakan pembelajaran dasar sampai pembelajaran ke tingkat yang paling tinggi.

Perbedaan pandangan tersebut membuat perdebatan pro dan kontra di kalangan masyarakat terkait kepemimpinan perempuan. Karena memang pandangan ulama telah terlegitimasi dan akan membawa dampak pada tataran masyarakat. Jika merujuk kepada teori Hegemoni Gramsci, teori tersebut juga datang pada saat yang hampir bersamaan dengan konteks yang terjadi di Kota Banda Aceh pada Pilkada Kota Banda Aceh Tahun 2017. Gramsci menuangkan pandangan Hegemoninya melalui sejarah Gereja Katolik Italia dengan menggalang dan memanfaatkan kaum cendekiawan sebagai alat Hegemoni Gereja pada saat itu. Pada saat itu Gereja berhasil menghegemoni masyarakat dengan memilih cendekiawannya melalui pendekatan Gereja, dan hasil pemilihan demokratis tersebut menghasilkan Cendekiawan yang dipilih sebagai pribadi yang dekat dengan Gereja dan bukan perwakilan dari rakyat jelata (Gramsci, 1976: 397).

Melalui pendekatan Gramsci yang memiliki persamaan dengan kasus pendapat Ulama di Aceh terkait kepemimpinan perempuan, hal tersebut dimaknai oleh Gramsci sebagai upaya Hegemoni. Hegemoni menurut Gramsci pada hakekatnya meruakan upaya untuk menggiring masyarakat agar menilai dan memandang problematika sosial dalam kerangka yang ditentukan. Hegemoni seperti inilah yang disebut dengan Hegemoni Kultural. Hegemoni Kultural ini tidak hanya terjadi antar kelas penguasa dan yang dikuasai, tapi juga terjadi dalam relasi sosial antar kelas sosial dalam suatu negara. Hegemoni kultural ini menjadi penentu dari sesuatu yang benar, baik dipandang secara moral maupun intelektual (Gramsci, 1976: 124).

Jika merujuk kepada apa yang disampaikan oleh Gramsci melalui Teori Hegemoni Kulturalnya, pada konteks Pilkada Kota Banda Aceh Tahun 2017 masyarakat Kota Banda Aceh menjadi terbelah akibat dari pandangan perbedaan pendapat kedua Ulama Aceh tersebut. Hegemoni Kultural yang disampaikan oleh Gramsci terjadi pada Pilkada Kota Banda Aceh Tahun 2017 dan telah menyebabkan pro dan kontra masyarakat terhadap perbedaan pandangan Ulama Aceh tersebut.

Menurut hasil temuan peneliti dilapangan, sebagian besar narasumber menyebutkan bahwa faktor Ulama sangat sentral dalam kemenangan Aminullah Usman yang menjadi satu-satunya pesaing calon

Pendapat Ulama Terhadap Isu Kepemimpinan Perempuan (Studi Kasus Illiza Sa'aduddin Djamal Dalam Kontestasi Pilkada Kota Banda Aceh 2017)

(Azmi Ramadhan, Faradilla Fadlia)

Jurnal ilmiah mahasiswa FISIP Unsyiah, Vol. 3. No. 3. Agustus 2018:

pemimpin yang berjenis kelamin perempuan yaitu Hj. Illiza Saaduddin Djamal. Pada tataran praktiknya yang berkembang dan menyebar di dalam masyarakat adalah bahwa pria lebih baik didahulukan sebagai pemimpin daripada perempuan yang lebih besar “mudharat-nya” atau memiliki keterbatasan yang lebih besar dari pria. Kepemimpinan perempuan dipandang kurang efektif sehingga lebih baik memilih pemimpin pria.

Dari semua hal tersebut di atas, dapat kita lihat bahwa Hegemoni Kultural Ulama sangat besar dalam kehidupan masyarakat Aceh, tak terkecuali dalam kehidupan politik Kota Banda Aceh. Ulama dalam realitanya tidak berpihak terhadap seorang calon, namun lebih kepada pertimbangan yang terkait dalil maupun hukum dalam Islam. Ulama yang berbeda pendapat mengemukakan dan menyajikan pendapatnya di ruang publik dengan tingkat pengaruh yang berbeda-beda dan kemudian masyarakat menentukan pilihan.

Tanggapan Aktivis Perempuan Mengenai Pendapat Ulama Terhadap Isu Kepemimpinan Perempuan

Dengan melihat fenomena yang terjadi pada Pilkada Kota Banda Aceh Tahun 2017 terkait kepemimpinan perempuan di Aceh, aktivis perempuan Aceh yang telah lama eksistensinya hadir didalam pergerakan dalam menyuarakan hak-hak kaum perempuan di Aceh memberikan tanggapan terkait hal tersebut. Dari hasil temuan dilapangan, peneliti melihat bahwa Hegemoni Ulama sangat besar. Sebagian besar Ulama sepakat bahwa sebaiknya mengutamakan pemimpin pria, karena perempuan terkendala kekurangan yang lebih besar dari pria.

Hegemoni dari Ulama telah mengkonstruksi pandangan masyarakat secara sosial, budaya, dan politik. Hal ini tentu saja tidak terlepas dari nilai-nilai keislaman yang dianut oleh masyarakat Aceh. Namun pada konteks Pilkada Kota Banda Aceh Tahun 2017 lalu respon aktivis perempuan di Kota Banda Aceh terkait isu kepemimpinan perempuan sangat beragam. Dengan demikian, kebanyakan dari mereka menjelaskan bahwa terjadi penurunan kualitas gerakan akibat beberapa alasan yang diantaranya adalah soal pendanaan dan absennya ketokohan dalam pergerakan perempuan. Oleh karena itu, respon terkait isu perempuan dan Pilkada ini ditanggapi tidak terlalu keras oleh aktivis perempuan. Tanggapan kebanyakan dalam bentuk kritikan terhadap ide dalam bentuk penulisan artikel, opini, pelaksanaan Group Discussion

Pendapat Ulama Terhadap Isu Kepemimpinan Perempuan (Studi Kasus Illiza Sa'aduddin Djamal Dalam Kontestasi Pilkada Kota Banda Aceh 2017)

(Azmi Ramadhan, Faradilla Fadlia)

Jurnal ilmiah mahasiswa FISIP Unsyiah, Vol. 3. No. 3. Agustus 2018:

dan bentuk advokasi lainnya.

Pendekatan yang dilakukan oleh aktivis perempuan dalam memandang Pilkada Kota Banda Aceh Tahun 2017 lalu melalui pendekatan konsep kepemimpinan. Hal ini disebabkan karena kepemimpinan perempuan sebelumnya yang kemudian mencalonkan kembali di anggap gagal dalam menjalankan roda pemerintahan Kota Banda Aceh. Jika merujuk kepada konsep kepemimpinan yang di sampaikan oleh Kartono yang mengatakan bahwa pemimpin adalah seorang pribadi yang memiliki kecakapan dan kelebihan khususnya kecakapan dan kelebihan di satu bidang, sehingga dia mampu mempengaruhi orang lain untuk bersama-sama melakukan aktivitas-aktivitas tertentu, demi pencapaian satu atau beberapa tujuan (Karton, 2009: 38).

Pendekatan terkait konsep kepemimpinan seperti pernyataan diatas juga peneliti temui dari tanggapan aktivis perempuan di Aceh. Walaupun pandangan Ulama terkait tidak dibolehkannya kepemimpinan perempuan ada pengaruhnya, namun itu tidak terlalu besar. Mereka mengeluhkan kepemimpinan perempuan atas dasar fakta ketika memimpin. Banyak kemudian persoalan dasar yang tidak bisa diselesaikan. Seperti misalnya pelayanan listrik dan air yang tidak dimaksimalkan pada saat kepemimpinan perempuan yang lalu. Kemudian faktor yang lebih dominan yang dirasakan kaum perempuan ketika kepemimpinan perempuan terkait pemberlakuan jam malam bagi perempuan, kebijakan pelarangan merayakan tahun baru dengan mengharuskan kedai-kedai kopi tutup, kebijakan-kebijakan yang tidak relevan tersebut yang menjadikan faktor kekalahan calon perempuan pada Pilkada Kota Banda Aceh Tahun 2017 lalu.

DAFTAR PUSTAKA

- Aguswandi dan Judith Large. 2008. Rekonfigurasi Politik: Proses Perdamaian Aceh. London: Conciliation Resource.
- Andi Arief, Nezar Patria. 2003. Antonio Gramsci: Negara dan Hegemoni. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Althusser, Luis. 2007. Filsafat Sebagai Senjata Revolusi. Yogyakarta: Resistbook.

- Bernard, Russell. 1994. *Metodologi Penelitian, Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Badruddin Hsubky, 1995. *Dilema Ulama dalam Perubahan Zaman*. Jakarta: Gema Insani Pers.
- Cahyadi Takariawan, 2003. *Fikih Politik Perempuan*. Surakarta: Era Intermedia.
- Abdul Qadir Djaelani, 1994. *Peran Ulama dan Santri dalam Memperjuangkan Politik Islam di Indonesia*. Surabaya: PT. Bina Ilmu 1994.
- Gramsci, Antonio. 1976. *Selection from the Prison Notebooks*. disunting oleh Quentin Hoare dan G. Nowell Smith, London: New Left Books.
- Edriana Noerdin, 2005. *Politik Identitas Perempuan Aceh*. Jakarta: Women Research Institute.
- Hadi, Sutrisno. 1993. *Metodologi Research, Jilid I*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Kartono Kartini, 2009. *Pemimpinan dan Kepemimpinan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Mar'at. 1983. *Pemimpin dan Kepemimpinan*. Jakarta: Ghalis Indonesia.
- Muhammad, Rusjdi Ali. 2003. *Revitalisasi Syariat Islam di Aceh*. Banda Aceh: Ar-Raniry Press.
- Moleong, Lexy. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Simon, Roger. 2004. *Gagasan-Gagasan Politik Gramsci*, Yogyakarta: INSIST press dan Pustaka Pelajar.
- Sugiono, Muhadi. 1999. *Kritik Antonio Gramsci Terhadap Pembangunan Dunia Ketiga*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugiarto A Santoso & Ferry Yuniver S. 2010. *Perempuan dan Perdamaian di Aceh*. Jakarta: MISPI & UNDP.
- Skripsi Lenny I.F.W. Simatupang. 2009. *Kepemimpinan Perempuan Dalam Birokrasi (Studi Deskriptif Pada Kantor Pemerintahan Provinsi Sumatera Utara, Medan)*
- Skripsi Supriyono. 2011. *Konflik Tentang Kepemimpinan Perempuan di Kesultanan Aceh Darussalam Tahun 1641-1699 M*.
- Nurhayati. 2015. *Feminisme dalam Kepemimpinan*. Jurnal Politik. No. 16. Palembang. Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah.
-

Pendapat Ulama Terhadap Isu Kepemimpinan Perempuan (Studi Kasus Illiza Sa'aduddin Djamal Dalam Kontestasi Pilkada Kota Banda Aceh 2017)

(Azmi Ramadhan, Faradilla Fadlia)

Jurnal ilmiah mahasiswa FISIP Unsyiah, Vol. 3. No. 3. Agustus 2018:

- Abidin Nurdin. 2012. Reposisi Ulama Dalam Penerapan Syariat Islam Di Aceh. Jurnal Al-Qalam. Volume 18. No. 16. Banda Aceh. Uनेversitas Malikussaleh.
- <http://www.kammiuinsuka.org/2015/03/kepemimpinan-dalam-islam-pengertian.html> (diakses pada 25 Februari 2017)
- <http://walikota.bandaacehkota.go.id/profil/index.html> (diakses pada 25 Februari 2017)
- <http://portalsatu.com/read/opini/rasul-larang-perempuan-memimpin-mengapa-di-aceh-ada-sultanah-19212> (diakses pada 14 April 2017)
- <http://www.modusaceh.co/news/teungku-jazuli-keliru-pendapat-perempuan-tak-boleh-jadi-pemimpin/index.html> (diakses pada 14 April 2017)
- <http://www.suduthukum.com/2016/06/kedudukan-ulama-dalam-pembentukan.html> (diakses pada 26 Juli 2017)
- <http://www.pikiranmerdeka.co/2017/02/21/jejak-kemenangan-amin-zainal> (diakses pada 29 Juli 2017)
- <http://www.acehkita.com/naskah-perjanjian-damai-ri-dan-gam/> (diakses pada 20 April 2018)
- <http://aceh.tribunnews.com/2014/10/10/pentingnya-blue-print-Syariat-Islam?page=2>. (diakses pada 13 Mei 2018)
- <https://www.kanalaceh.com/2017/02/09/abu-tumin-tak-ada-nash-perempuan-haram-memimpin/> (diakses pada 07 Mei 2018)
- <http://aceh.tribunnews.com/2018/04/21/kiprah-kartini-aceh-dari-masa-ke-masa> (diakses pada 25 Juni 2018)